



2018

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahanNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ini dapat terselesaikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengharuskan memberi informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tersusunnya LPPD ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya dalam penyusunan LPPD ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini.

Putussibau, 28 Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

1950



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR HUKUM.....	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.....	3
2. Sekretaris.....	3
3. Kepala Subbagian Program.....	4
4. Kepala Subbagian Keuangan.....	5
5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.....	5
6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi.....	6
7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan.....	7
8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi.....	7
9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.....	8
10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.....	9
11. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.....	9
12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil.....	10
13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat.....	10
14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP.....	11
15. Kelompok Jabatan Fungsional.....	12
C. SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
D. SARANA DAN PRASARANA.....	15
E. SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018.....	15
BAB II.....	17
RENCANA STRATEGIS.....	17
A. VISI DAN MISI.....	17
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	17
C. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
1. Sekretariat.....	18



2.	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil.....	19
3.	Bidang Penegakan dan Operasi.....	19
4.	Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana	19
BAB III.....		21
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI.....		21
A.	Sekretariat.....	21
B.	Bidang Penegakan dan Operasi	22
C.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	22
D.	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	23
BAB IV		24
PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....		24
A.	TUGAS PEMBANTUAN	24
B.	KERJASAMA DAERAH.....	24
C.	KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	24
D.	KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	24
1.	Forum Kerukunan Umat Beragama	24
2.	Forum Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan	24
E.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH	25
BAB V.....		26
PENUTUP.....		26
A.	PERMASALAHAN	26
1.	Faktor Internal.....	26
2.	Faktor Eksternal	28
B.	SOLUSI	29
1.	Faktor Internal.....	29
2.	Faktor Eksternal	32
LAMPIRAN		33

1950



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai Per Esselon, Pendidikan, Golongan Ruang dan Diklat PIM	13
Tabel 2 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu.....	15
Tabel 3 Program dan Kegiatan.....	18
Tabel 4 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan	21





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018	34
LAMPIRAN 2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018	42
LAMPIRAN 3 RINCIAN PROGRAM/ KEGIATAN BESERTA ANGGARAN DAN REALISASINYA TAHUN 2018	49
LAMPIRAN 4 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2018	52
LAMPIRAN 5 PEMBINAAN BATAS-BATAS WILAYAH TAHUN 2018	53
LAMPIRAN 6 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2018	54
LAMPIRAN 7 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2018	55
LAMPIRAN 8 DATA PEGAWAI SATPOL PP TAHUN 2018	56
LAMPIRAN 9 ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN 2018	58
LAMPIRAN 10 HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS URUSAN	59
LAMPIRAN 11 STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP TAHUN 2018	64
LAMPIRAN 12 PAPAN PENGUMUMAN	65
LAMPIRAN 13 FOTO POS PENGADUAN	66
LAMPIRAN 14 FOTO KEGIATAN SATPOL PP TAHUN 2018	67
LAMPIRAN 15 FOTOCOPY RENSTRA 2016-2021, RENJA 2018, RKA 2018 DAN DPPA 2018	72
LAMPIRAN 16 LAPORAN KEUANGAN (Neraca, LRA dan CaLK)	72
LAMPIRAN 17 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	72
LAMPIRAN 18 BERITA ACARA REKON ASSET	72
LAMPIRAN 19 PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU	72
LAMPIRAN 20 DAFTAR URUT KEPANGKATAN & NOMINATIF	72
LAMPIRAN 21 KARTU INVENTARIS BARANG	72
LAMPIRAN 22 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK-0)	72

1950



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

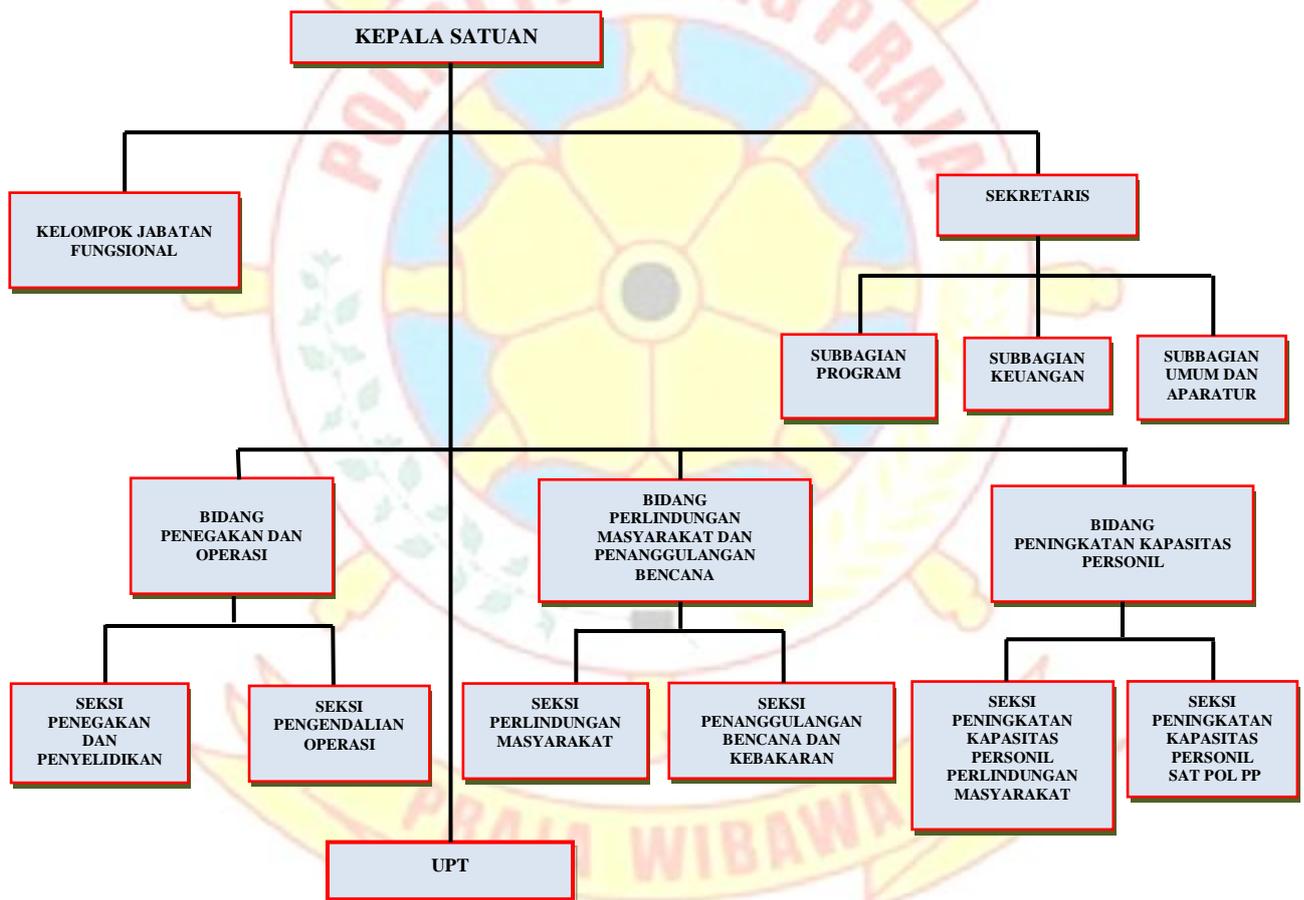


Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar berikut

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 65 Tahun 2016)



Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :



1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;



- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;



- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan Masyarakat;
- 4) Pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

a. Tugas

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;



- 3) Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
- 4) Fasilitasi penanganan darurat bencana;
- 5) Fasilitasi penanganan kebakaran;
- 6) Fasilitasi penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana dan Kebakaran; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

a. Tugas

Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kapasitas personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional satuan polisi pamong praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang data dan informasi kependudukan secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peningkatan Kapasitas Personil secara Periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh 70 orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :





Tabel 1 Data Pegawai Per Esselon, Pendidikan, Golongan Ruang dan Diklat PIM

NO.URUT	BAGIAN/ BIDANG/ URUSAN	PANGKAT DAN GOL. II						PANGKAT DAN GOL. III						PANGKAT DAN GOL. IV															
		JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	DIKLAT PIM		JLH	JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	DIKLAT PIM		JLH				
		L	P		SMP	SMA		L	P		SMA	DIPLOMA		S1	S2		III	IV		L	P		DIPLOMA	S1		S2	II	III	IV
1	2	3	4	5(3+ 4)	6	7	8(6+ 7)	9	10	11(9 +10)	12	13	14	15	16(12 S.D.15)	17	18	19(17 +18)	20	21	22(20 +21)	23	24	25	26(23 s.d.25)	27	28	29	30(27 s.d.29)
1	SEKRETARIAT																												
	A. ESELON II			0			0			0					0			0	1		1			1	1			1	1
	B. ESELON III			0			0			0					0			0	1		1			1	1			1	1
	C. ESELON IV			0			0	1	2	3	1		2		3	3		0			0			0					0
	D. PELAKSANA	4		4		4	4	1	4	5	2		2	1	5	1		1			0			0					0
	JUMLAH	4	0	4	0	4	4	2	6	8	3	0	2	3	8	1	3	4	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	2
2	Bidang Penegakan dan Operasi																												
	A. ESELON II			0			0			0					0			0			0				0				0
	B. ESELON III			0			0			0					0		1				1			1	1			1	1
	C. ESELON IV			0			0	2		2	1		1		2		2				0			0					0
	D. PELAKSANA	4		4	1	3	4			0					0			0			0			0					0
	JUMLAH	4	0	4	1	3	4	2	0	2	1	0	1	0	2	0	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.	Bidang Linmas & Penanggulang an Bencana																												
	A. ESELON II			0			0			0					0			0			0				0				0
	B. ESELON III			0			0			0					0			0			0				0				0
	C. ESELON IV			0			0	2		2	1		1		2		2				0			0					0
	D. PELAKSANA	2	1	3	1	2	3	6		6	5		1		6			0			0			0					0



D. SARANA DAN PRASARANA

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang mendukung Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil Patroli	1 Unit	1	-	-	
2	Mobil PAMWAL	2 Unit	2	-	-	
3	Mobil DAMKAR	3 Unit	3	-	-	
4	Mobil Kasat/ Avanza	1 Unit	1	-	-	
5	Sepeda Motor	26 Unit	26	-	-	
6	Speed Boat	1 Unit	1	-	-	

E. SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini disusun dengan penyajian dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Sistematika Laporan.

**BAB II : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan

BAB III : PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

BAB IV : PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

DOKUMEN PENDUKUNG





BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Misi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah : “MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”.

2. Pernyataan Misi

Untuk melaksanakan Visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki misi sebagai berikut :

- a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih; dan
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengukur sejauh mana visi dan misi Bupati Kapuas Hulu telah dicapai. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
- b. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif; dan
- c. Terwujudnya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Efektif dan Efisien

2. Sasaran

Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP



- b. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Meningkatnya Penanganan Bencana; dan
- d. Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan serta Penanganan Kebakaran di Kabupaten Kapuas Hulu.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 Program dan Kegiatan

1. Sekretariat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya Penyediaan Jasa Publikasi
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	



		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Pengadaan Mebeulair
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

2. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

3. Bidang Penegakan dan Operasi

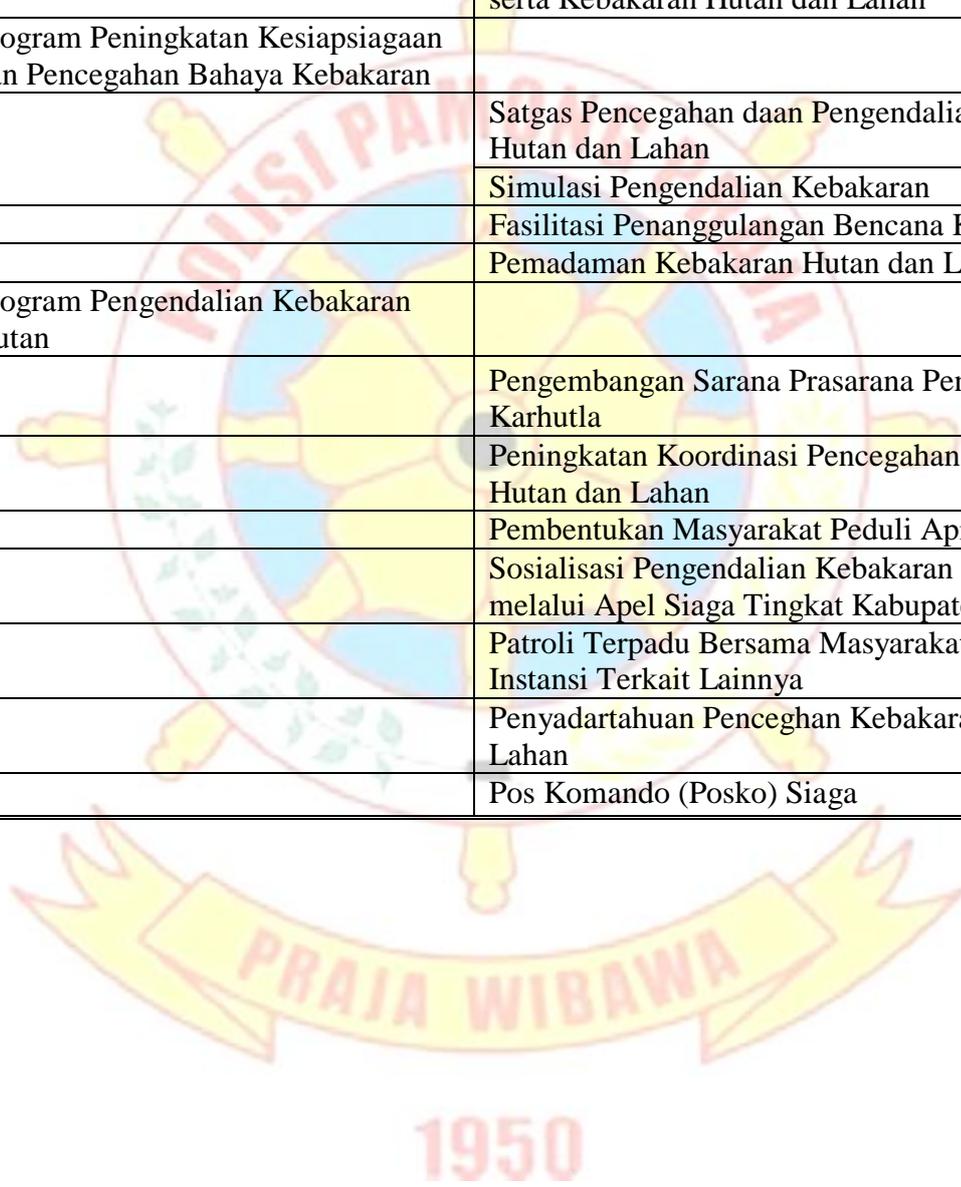
NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	
		Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
		Pengawasan Pedagang Kaki Lima
2	Pogram Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	
		Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas
		Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda
		Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	
		Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
2	Program Pencegahan Dini Dan	



	Penanggulangan Korban Bencana Alam	
		Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana
		Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsir
		Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan
3	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		Simulasi Pengendalian Kebakaran
		Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
		Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
4	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	
		Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla
		Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
		Pembentukan Masyarakat Peduli Api
		Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten
		Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya
		Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
		Pos Komando (Posko) Siaga





BAB III PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati Kapuas Hulu, dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi (DBHDR) Tahun 2018. Adapun alokasi dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Tabel 4 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.671.816.500	4.602.779.588	98,52
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.640.000	6.640.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.840.000	42.964.932	70,62
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	18.725.000	15.165.000	80,99
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.440.000	90.660.000	97,02
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	30.000.000	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97.103.000	97.103.000	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.899.500	24.622.500	98,89
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.940.000	15.940.000	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.600.000	85.565.000	99,96
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	12.000.000	11.500.000	95,83
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	166.250.000	166.240.000	99,99
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	536.813.000	536.812.654	100,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	548.760.000	548.745.000	100,00
14	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	222.556.000	222.496.502	99,97
15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	2.744.750.000	2.705.280.000	98,56
16	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000	3.045.000	40,60
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	461.545.000	461.534.450	100,00
1	Pengadaan Mebeulair	90.350.000	90.345.950	100,00
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	371.195.000	371.188.500	100,00



III	Peningkatan Disiplin Aparatur	204.245.000	204.191.225	99,97
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	188.150.000	188.148.950	100,00
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	16.095.000	16.042.275	99,67
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.673.750	32.287.500	98,82
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	32.673.750	32.287.500	98,82
Total		5.370.280.250	5.300.792.763	98,71

B. Bidang Penegakan dan Operasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	116.166.000	116.015.000	99,87
1	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.275.000	15.275.000	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	53.478.000	53.423.000	99,90
3	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	47.413.000	47.317.000	99,80
II	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	267.419.000	263.818.000	98,65
1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	155.485.000	155.485.000	100,00
2	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	48.446.000	48.446.000	100,00
3	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.488.000	59.887.000	94,33
TOTAL		383.585.000	379.833.000	99,02

C. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	65.210.000	64.720.500	99,25
1	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	65.210.000	64.720.500	99,25
II	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	430.998.500	430.563.300	99,90
1	Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana	197.140.500	197.140.500	100,00
2	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	153.370.000	152.939.000	99,72
3	Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	80.488.000	80.483.800	99,99



III	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	630.932.500	420.028.600	66,57
1	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	125.846.000	76.499.000	60,79
2	Simulasi Pengendalian Kebakaran	22.579.000	20.963.000	92,84
3	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	225.465.000	217.525.000	96,48
4	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	257.042.500	105.041.600	40,87
IV	Pengendalian Kebakaran Hutan	1.425.660.400	296.785.777	20,82
1	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla	772.090.000	-	0,00
2	Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	163.657.000	143.020.377	87,39
3	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	118.979.400	74.587.400	62,69
4	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	53.264.000	-	0,00
5	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi Terkait Lainnya	79.508.000	36.728.000	46,19
6	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	187.562.000	-	0,00
7	Pos Komando (Posko) Siaga	50.600.000	42.450.000	83,89
TOTAL		2.552.801.400	1.212.098.177	47,48

D. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)
1	2	3	4	5
I	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.588.421	121.945.421	99,48
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	68.908.421	68.585.421	99,53
2	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	53.680.000	53.360.000	99,40
II	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	76.380.000	59.530.000	77,94
1	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	76.380.000	59.530.000	77,94
TOTAL		198.968.421	181.475.421	91,21



BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. TUGAS PEMBANTUAN

Untuk Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan tugas pembantuan

B. KERJASAMA DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan kerjasama daerah

C. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga

D. KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Kerukunan Umat Beragama

1. Materi Koordinasi
Adapun materi dari forum ini adalah forum kerukunan umat beragama.
2. Instansi Vertikal yang terlibat
Instansi vertikal yang terlibat adalah Kementerian Agama dan Polres.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
NIHIL
4. Jumlah Koordinasi
Koordinasi dalam forum ini hanya dilakukan satu kali pada tahun 2018.
5. Hasil dan Manfaat Koordinasi
Hasil dan manfaat dari koordinasi forum lalu lintas angkutan jalan tersebut adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dan terciptanya rasa kebersamaan.
6. Kegiatan ini dihadiri oleh bapak Sekretaris Daerah.

2. Forum Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Materi Koordinasi
Adapun materi adalah kebakaran hutan dan lahan



2. Instansi Vertikal yang terlibat
Instansi vertikal yang terlibat adalah TNI, POLRI dan TNBK.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber anggaran dari kegiatan ini adalah APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp141.000.000,-.
8. Jumlah Koordinasi
Koordinasi dalam forum ini dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2018.
9. Hasil dan Manfaat Koordinasi
Hasil dan manfaat dari koordinasi forum ini adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, memadamkan api dan memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan tanpa seijin pihak yang berwenang.

E. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Sengketa yang terjadi pada Tahun 2018 yaitu sengketa Tanah Pemerintah Daerah yang berada di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.

- a. Sengketa Batas Wilayah Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
Sengketa batas wilayah Desa Pala Pulau dengan dengan Desa Sibau Hilir sedang dalam proses penyelesaian dengan melibatkan tokoh adat antara kedua desa yang di fasilitasi oleh pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dengan mengutamakan semangat kebersamaan.
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat
SKPD yang terlibat dalam permasalahan sengketa batas wilayah tanah Pemda selain Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pertanahan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Polres Kapuas Hulu dan Pengadilan Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB V PENUTUP

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja dan keuangan, antara lain :

1. Faktor Internal

a Personil Satpol PP

Ketersediaan jumlah personil tidak sebanding dengan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan tugas masing-masing unit/regu/peleton yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP sepanjang tahun 2018 terjadi penumpukan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing individu personil Sat Pol PP. Standar efektifitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah:

- Memiliki regu patroli kota minimal 15 orang
- Memiliki regu patroli air minimal 6 orang
- Memiliki regu penjagaan pada rumah dinas pejabat daerah minimal 4 orang dalam satu regu dan 6 orang dalam satu regu piket di Kantor Bupati Kapuas Hulu;
- Memiliki regu deteksi dini/intelijen minimal 10 orang;
- Memiliki peleton Dalmas/Anti huru hara berjumlah 30 orang;
- Memiliki regu taktis/penindakan penanganan pelanggaran tibum dalam kota minimal 30 orang;
- Memiliki unit PPNS minimal 3 orang

Sehingga kebutuhan personil operasional lapangan/non administrasi idealnya berjumlah 118 orang.

b Personil Satlinmas

- Tidak tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan personil Satlinmas pada desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu.



- Peran serta Satlinmas di tiap-tiap desa belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan

c Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - Terbatasnya personil yang memiliki Pangkat/gol.ruang III/a yang menjadi syarat mengikuti diklat PPNS
 - Terbatasnya personil golongan III yang memiliki Ijazah S-1 Ilmu Pemerintahan dan S-1 Ilmu Hukum yang merupakan ilmu linear dalam kualifikasi diklat PPNS Pol PP
2. Tenaga Profesional Personil Pemadam Kebakaran
Minimnya personil pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi khusus dalam perencanaan dan penanganan kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan/hutan
3. Analis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Tidak adanya analis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu

d Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tidak adanya kendaraan taktis dalam moblisasi personil (truck dalmas pengangkut pasukan)
- Terbatasnya alat pelindung diri dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 15 unit dan idealnya 30 unit.
- Tidak adanya kamera pengawas (CCTV) di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah pada titik-titik rawan yang tidak terpantau oleh petugas piket.
- Tidak adanya kendaraan operasional patroli roda dua untuk memantau daerah-daerah rawan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.



- Tidak adanya kendaraan operasional patroli air sehingga kejadian pelanggaran tibatubum didaerah perairan terhambat.
- Tidak adanya alat komunikasi (HT) dengan jangkauan meliputi 23 kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi taktis lapangan antar sektor dalam kabupaten Kapuas Hulu.
- Minimnya tempat penampungan air (Tandon/Reservoir) untuk cadangan air pemadam kebakaran yang saat ini hanya berjumlah 4 penampungan air yaitu 2 tandon di Putussibau kota dan 1 tandon, 1 reservoir di Kedamin. Sehingga diperlukan minimal 4 tandon lagi di Putussibau kota dan 4 tandon di Kedamin.

e Anggaran Operasional

Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah kabupaten Kapuas Hulu

f Wilayah Manajemen Kebakaran

Sampai tahun 2018 baru terbentuk 1 WMK yaitu di Putussibau Kota sehingga idealnya untuk wiayah Putussibau kota dan Kedamin harus terbentuk 2 WMK

g UPT Polisi Pamong Praja

Belum terbentuknya UPT dikecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Sat Pol PP Kabupaten dengan Sat Pol PP kecamatan

2. Faktor Eksternal

a Fungsi Koordinasi antar OPD

Tidak berjalan dengan maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang menjalankan Perda/Perkada sehingga pengawasan/penindakan pelanggaran Perda/Perkada oleh Sat Pol PP menjadi lambat. Ego sektoral menjadi penghambat berjalannya fungsi koordinasi secara maksimal dan optimal



b Produk Hukum Perda dan Perkada

Perda yang mengatur tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda tersebut sudah tidak berlaku lagi

B. SOLUSI

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a Personil Pol PP

Upaya yang dilakukan Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu dalam menanggulangi kekurangan personil operasional adalah melibatkan seluruh unsur personil, baik unsur personil lapangan maupun unsur personil administrasi dalam pelaksanaan tugas patroli, penjagaan, pengendalian massa (Dalmas), intelijen, regu taktis sehingga 1 (satu) orang personil Pol PP melaksanakan tugas lebih dari satu tanggung jawab pekerjaan. Tumpang tindih pembebanan tanggung jawab pekerjaan membuat pelaksanaan fungsi pembinaan dan penindakan penyelenggaraan trantibmas menjadi tidak efektif dan maksimal.

Langkah-langkah yang diambil diantaranya:

- Menugaskan personil untuk melakukan piket pada pos penjagaan rumah dinas pejabat dan kantor Bupati Kapuas Hulu selama 1x24 jam
- Mengatur jadwal patroli, operasi intelijen, pengendalian massa dan operasi regu taktis sehingga seluruh sasaran kegiatan dapat dilaksanakan meskipun hasilnya kurang efektif dan maksimal dikarenakan kemampuan fisik anggota terbatas untuk melakukan seluruh kegiatan yang ada

b Personil Satlinmas

- Mengingat biaya pengadaan pakaian dan perlengkapan personil Satlinmas se-Kabupaten Kapuas Hulu relatif besar, maka Sat Pol PP Kapuas Hulu hanya melengkapi personil Satlinmas desa-desa yang termasuk dalam program Kampung KB



- Melakukan penyuluhan ke desa-desa yang tergolong rawan gangguan trantibmas khususnya desa-desa yang berbatasan dengan malaysia dan desa-desa yang rawan bencana alam.

c Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- PPNS
Sampai periode bulan Desember 2018 Sat Pol PP hanya memiliki 1 (satu) orang PPNS dan belum mengirimkan personil untuk mengikuti diklat sertifikasi PPNS mengingat keterbatasan sumber daya personil yang memenuhi persyaratan kualifikasi PPNS
- Tenaga Profesional Personil Pemadam Kebakaran
Sampai periode bulan Desember 2018 personil pemadam kebakaran yang telah mengikuti bimtek pemadam kebakaran berjumlah 3 (tiga) orang hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran pendidikan dan latihan pada tahun anggaran 2018 serta tidak adanya panggilan bimtek pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi maupun pusat
- Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Melakukan optimalisasi jabatan fungsional Pol PP untuk melakukan analisa segala bentuk pelanggaran perda/perkada meskipun kualifikasi ilmu tidak linear dengan kebutuhan tugas yang disyaratkan serta bekerjasama dengan pihak Polres Kapuas Hulu

d Sarana dan Prasarana Aparatur

- Memaksimalkan kendaraan dinas yang dimiliki serta kendaraan pribadi dalam melakukan mobilisasi personil meskipun daya tampung kendaraan tidak mencukupi jumlah personil yang akan dimobilisasi
- Mengintensifkan strategi negoisasi dalam penanganan unjuk rasa sehingga dapat meminimalisir segala bentuk tindakan-tindakan anarkis serta bekerjasama dengan personil Dalmas Polres Kapuas Hulu
- Mengintensifkan pengawasan dalam bentuk patroli lingkungan di wilayah rumah dinas pejabat dan kantor Bupati Kapuas Hulu



- Melakukan pendekatan yang intensif kepada para ketua RT/RW di tiap-tiap kelurahan untuk bekerjasama melaporkan atau melakukan pengawasan terhadap segala bentuk potensi gangguan tibus serta melaporkan ke Sat Pol PP
- Untuk patroli air tidak dapat dilaksanakan mengingat kebutuhan operasional BBM yang cukup besar dan tidak adanya kendaraan patroli air sehingga segala bentuk potensi gangguan tibus yang terjadi hanya dilakukan pengumpulan informasi dari sumber terpercaya dan bekerjasama dengan Polairud Polres Kapuas Hulu dalam penindakannya
- Sarana komunikasi hanya memanfaatkan HP antar personil dilapangan meskipun dinilai kurang efektif mengingat seringkali terjadi gangguan jaringan seluler
- Untuk daerah yang tidak memiliki cadangan air atau tidak terpasang tandon dan reservoir maka Satdamkar menggunakan air kapuas atau dari PDAM sehingga pemadaman api terhambat khususnya daerah-daerah kebakaran yang jarak tempuh lebih dari 15 menit

e Anggaran Operasional

- Intensifitas pengawasan daerah-daerah rawan terdekat dan bekerjasama dengan Banbinsa dan Babinkamtibmas untuk menanggulangi keterbatasan anggaran dalam melakukan deteksi dini gangguan tibus di kabupaten Kapuas Hulu
- Mengurangi jumlah personil yang ditugaskan dalam melakukan deteksi dini maupun penindakan pelanggaran

f Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

- Mengintensifkan Response Time Rate meskipun sumber kebakaran jauh dari Posko Damkar
- Bekerjasama dengan yayasan Pemadam Kebakaran, Satgas Damkar Bandara Pangsuma untuk kejadian kebakaran di daerah Kedamin

g UPT Polisi Pamong Praja di Kecamatan

- Meskipun peran serta personil Sat Pol PP di Kecamatan dinilai belum maksimal tetapi jalur komando tetap dilaksanakan dengan melakukan kerjasama tim intelijen Sat Pol PP Kabupaten dengan tim intelijen Polsek dan Koramil dalam pengawasan



serta penindakan gangguan tibus di wilayah kecamatan dalam kabupaten Kapuas Hulu

- Mendorong para Kepala Seksi Trantibus di Kecamatan untuk menyampaikan situasi dan kondisi trantibus di wilayah kecamatan secara periodik

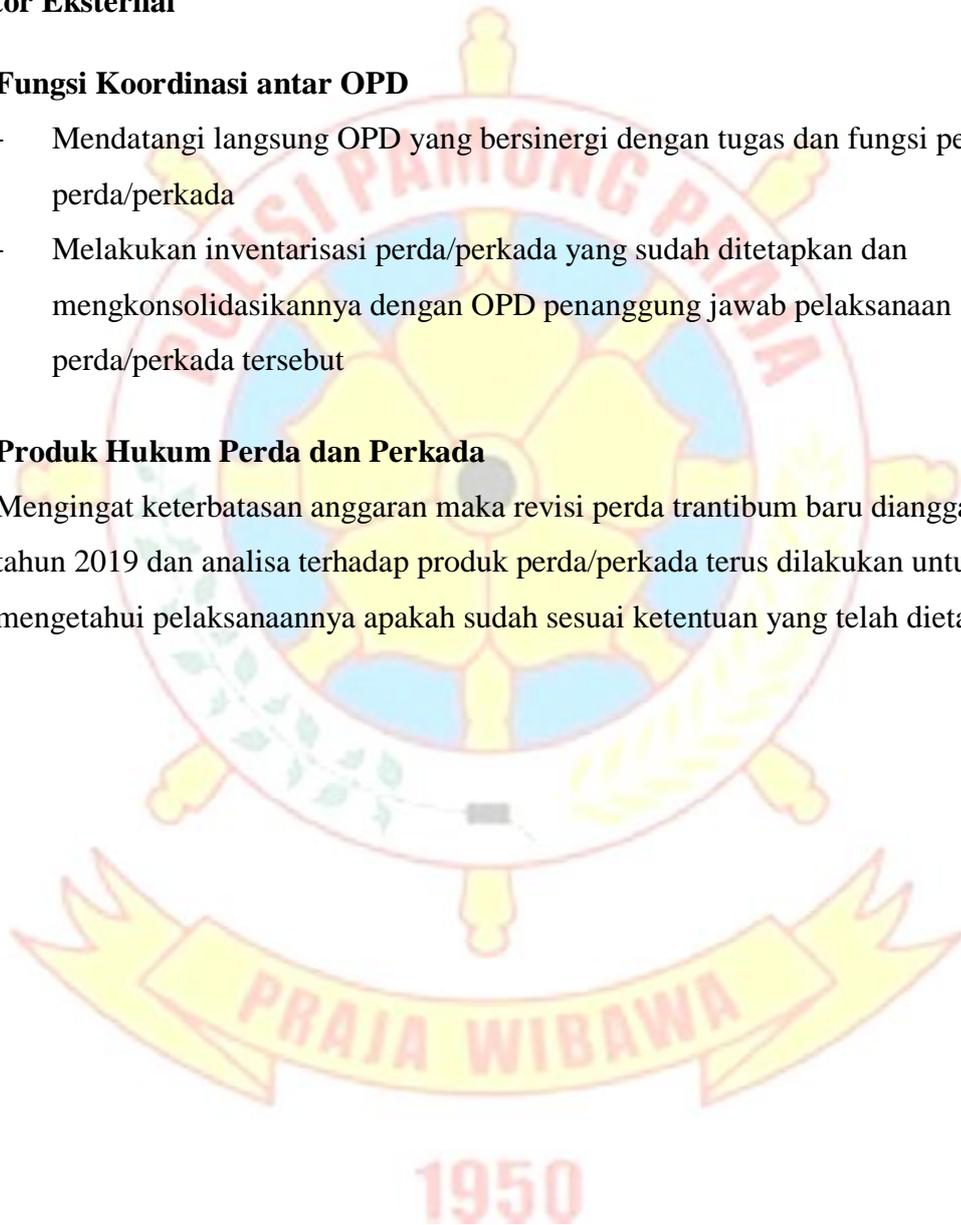
2. Faktor Eksternal

a Fungsi Koordinasi antar OPD

- Mendatangi langsung OPD yang bersinergi dengan tugas dan fungsi penegakan perda/perkada
- Melakukan inventarisasi perda/perkada yang sudah ditetapkan dan mengkonsolidasikannya dengan OPD penanggung jawab pelaksanaan perda/perkada tersebut

b Produk Hukum Perda dan Perkada

Mengingat keterbatasan anggaran maka revisi perda trantibus baru dianggarkan pada tahun 2019 dan analisa terhadap produk perda/perkada terus dilakukan untuk mengetahui pelaksanaannya apakah sudah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.







LAMPIRAN 1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
 DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN KAPUAS HULU

No	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/	Jenis Data	Capaian	Keterangan	
					PERHITUNGAN	(Tahun 2018)	KInerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	0 Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : Tentang	Ada		
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2018, sebanyak unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2018, sebanyak- Unit.			
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034	Ada		
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah Penduduk Yang Sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP			Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: SE Mnedagri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 Tentang Prubahan Kebijakan dlaam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tidak dipungut		Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP	6	Rasio personil Satpol PP	Jumlah personil Satpol PP pada	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak = 152 orang	152	0,06%	



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018*

		(Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)		terhadap jumlah penduduk	akhir tahun 2018 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Penduduk pada akhir tahun 2018, berjumlah = 240.736 orang	240.736	
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada	
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2018 disampaikan pada tanggal -2019 sesuai surat pengantar Nomor-- tanggal 2019.	tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal - sesuai surat pengantar Nomor --.....- tanggal .	tepat	
			11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	- Laporan Kinerja tahun 2018. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2019	Tepat/tidak	Normalisasi
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari:	6 Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 6 urusan.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018*

				pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial		1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan PU dan Penataan Ruang 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Urusan Trantibum dan Linmas 6. Urusan Sosial
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU nomor ----- MOU	Sumber data dari Bagian pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak program -Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 program prioritas-		Sumber data dari BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014)x100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (APBD) = urusan.		Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2012. APBD tahun 2018
			16	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : tentang ----- APBD 2018. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2017).	Tepat	Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2016.
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor :10 Tahun2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (pengelolaan keuangan daerah)	Ada	
			18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah	dasar hukum:	773.189.000,00	5% Sumber data dari Badan Keuangan Daerah .



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018*

		Keuangan		total belanja X 100%	1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 773.189.000 6) Urusan Sosial Total Belanja pelayanan dasar Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp 1.656.900.775.068,00	Rp1.656.900.775.068		
	19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan Total Belanja Pend & Kes%			
	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayananana Publik (standar pelayanan publik')	Ada			
	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2018 sebanyak orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2018 sebanyak orang.				
	22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari	Ada			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

				kepegawaian		Sistem database: SIMPEG (tentang kepegawaian)		
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 10 unit 2) Dinas = 18 unit 3) Badan = 3 unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = unit 6) Lembaga Teknis lainnya = 3 unit 7) Kecamatan/Distrik = 23 unit Jumlah SKPD = 57 unit	57 unit	Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak..... Perda (Daftar terlampir)		lampirkan daftar PERDA yang ditetapkan
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak PERDA.		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak----- keputusan.		lampirkan daftar keputusan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK	Tindaklanjut keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2018 x	- Keputusan Bupati tahun 2018, sebanyak keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak keputusan.	100%	Lampirkan daftar Keputusan Bupati



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

	LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN				100%				
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	- Peraturan Bupati dalam tahun 2018, sebanyak Perbup. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak Perbup.		100%	Lampirkan daftar Peraturan Bupati
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun tentang ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun tentang ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak - ----	0 ----- 0	tidak ada	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun --- ---- tentang ----- (konsultasi publik)	Tidak ada		
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya : www.kapuashulukab.go.id Radio Rasika - Sebutkan Perda no 13 tahun 2014 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Kapuas Hulu	Ada		
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.312.582.013.000			
		Alokasi Belanja pada	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x	- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp.			lap. Pertanggungjawaban



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018*

		APBD dari DAU			100%			realisasi
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- DAU Tahun 2018, sebesar Rp. - Total Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. - Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 745.255.633.168		lap. Pertanggungjawaban realisasi
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp		lap pertanggungjawaban
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: -----	Opini tahun 2017 = WTP Opini tahun 2018 =	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (<i>TW/adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2018, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp -- ---- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. -- ----		
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp.		Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018 , sebanyak437 temuan - Temuan BPK RI sampai dengan	437	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

						nakhir tahun 2018 sebanyak Temuan			
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar - Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 APBD = Rp. 67.658.070.968			Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2018- PAD 2017) : PAD 2017 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. 93.093.542.321.85		0%	
							Rp 93.093.542.321,85		
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari			Lampirkan daftar penghargaan yang diterima kabupaten
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -Januari-tahun -2014---		Ada	
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak -.... ijin	 ijin	Lampirkan Daftar ijin investasi



1950



LAMPIRAN 2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KAPUAS HULU
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Urusan (1) -----	Urusan (1) -----	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Tidak Ada	100,00%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 SOP Satpol PP : 1. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan Satpol PP Kab. Kapuas Hulu 2. SOP Peningkatan Kemampuan Aparatur Anggota Satpol PP 3. SOP Pelaksanaan	Ada 8 SOP	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2018

					Penanggulangan Kebakaran 4. SOP Pelaksanaan Pengawalan VIP dan Pengamanan 5. SOP Patroli dan Pengawasan 6. SOP Perlindungan Masyarakat 7. SOP Pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% - PERDA pelaksanaan sebanyak 7 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7	$\frac{7}{7}$	100%	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	bv	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	$\frac{14}{14}$	100,00%	Sumber data BKPSDM/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional , Pol PP Ahli Pertama Pol PP Terampil	Ada		Sumber data BKPSDM/Perangkat Daerah Mengacu kondisi Perangkat Daerah terkahir/updated Tahun 2018



4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 70 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5051 personil	122 5051	2,42%	Sumber data mengacu kondisi prangkat daerah terakhir/updated tahun 2018/BKPSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	12 13	92,31%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	13 13	100,00%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 Jenis , yang terdiri dari -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah		Sumber data BAPPEDA/perangkat Daerah yang bersangkutan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2018

				-RKA-Perangkat Daerah	-RKA-Perangkat Daerah	-RKA-Perangkat Daerah			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11	11 9	122%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.	11 11	100%	Sumber data perangkat daerah mengacu dokumen RKA perangkat Daerah tahun 2018
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.	11 11	100%	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2018

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Alokasi Anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.278.493.071 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.656.900.775.068	Rp 14.278.493.071,00	0,81%	Sumber data dari APBD tahun 2018
							Rp 1.765.282.969.757,04		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	Rp 938.700.000,00	6,57%	Sumber data ralisasi apbd tahun 2018
							Rp 14.278.493.071,00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar	Rp 202.920.000,00	4,32%	Sumber data ralisasi APBD tahun 2018
							Rp 4.700.745.071,00		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar	Rp 202.920.000	1,42%	Sumber data ralisasi APBD tahun 2018
							Rp 14.278.493.071		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada , sebanyak 3 Jenis 1. Neraca 2. LRA 3. CaLk	Ada Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLk		Sumber data Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ KIB		Sumber data dari BKD , dikumennya (inventarisari minimal 1 kali dalam 5 tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak.... asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak.... asset.		0,00%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BKD (Berita acara inventarisasi rekonsiliasi penyerahan barang/aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan . Penyebut : Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil Patroli	Ada sebanyak jenis : 1 Buah 4 Pos Tidak Ada 1		Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

			5. Pengumuman di Mass Media		Mobil Pamwal Pengumuman di Mass Media	2 Tidak Ada		
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang.....	Tidak Ada		Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah





LAMPIRAN 3 RINCIAN PROGRAM/ KEGIATAN BESERTA ANGGARAN DAN REALISASINYA TAHUN 2018

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER SKPD BESERTA ANGGARAN DAN REALISASINYA

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.671.816.500	4.602.779.588	98,52
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.640.000	6.640.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.840.000	42.964.932	70,62
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	18.725.000	15.165.000	80,99
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.440.000	90.660.000	97,02
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	30.000.000	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97.103.000	97.103.000	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.899.500	24.622.500	98,89
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.940.000	15.940.000	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.600.000	85.565.000	99,96
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	12.000.000	11.500.000	95,83
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	166.250.000	166.240.000	99,99
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	536.813.000	536.812.654	100,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	548.760.000	548.745.000	100,00
14	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	222.556.000	222.496.502	99,97
15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	2.744.750.000	2.705.280.000	98,56
16	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000	3.045.000	40,60
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	461.545.000	461.534.450	100,00
1	Pengadaan Mebeulair	90.350.000	90.345.950	100,00



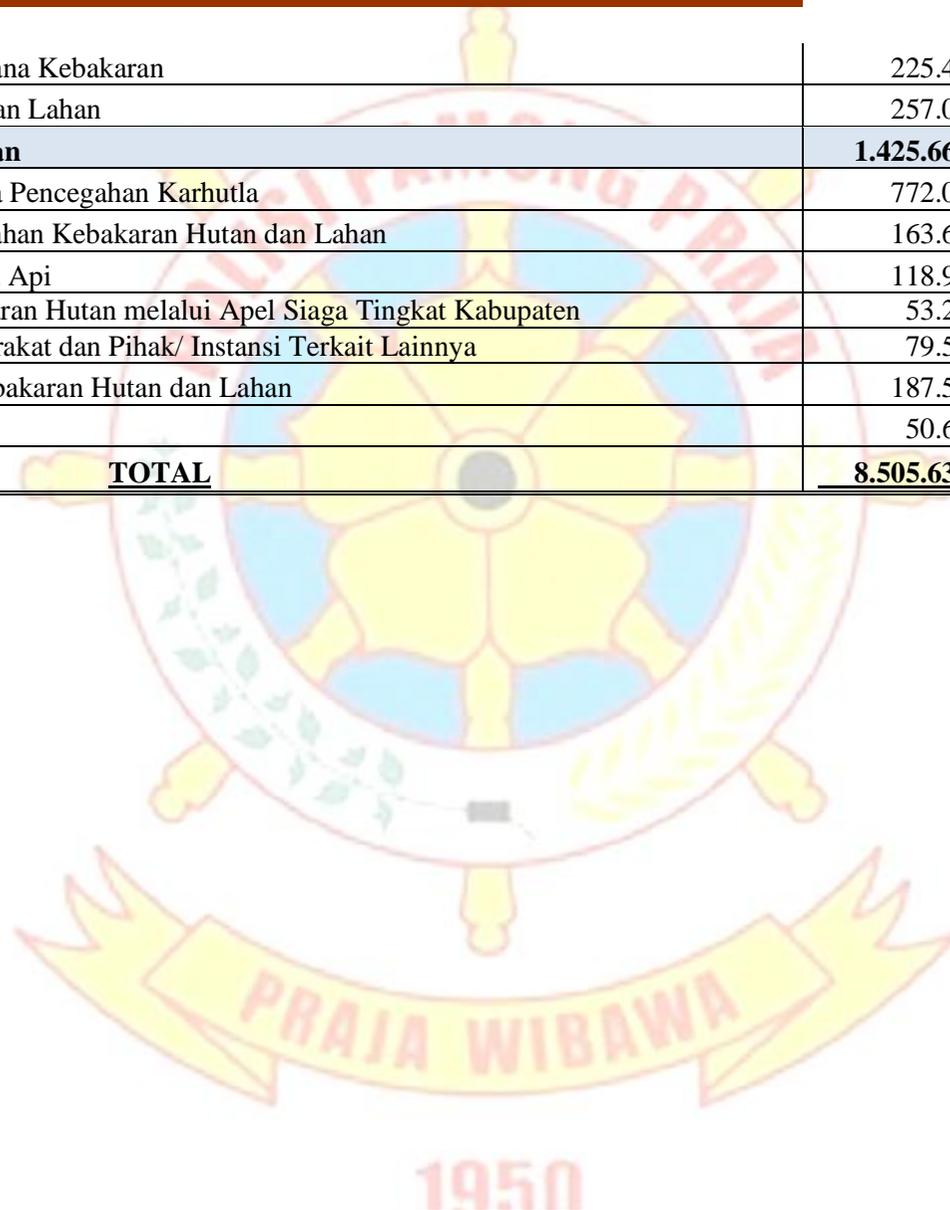
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	371.195.000	371.188.500	100,00
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	204.245.000	204.191.225	99,97
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	188.150.000	188.148.950	100,00
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	16.095.000	16.042.275	99,67
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.588.421	121.945.421	99,48
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	68.908.421	68.585.421	99,53
2	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	53.680.000	53.360.000	99,40
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.673.750	32.287.500	98,82
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	32.673.750	32.287.500	98,82
VI	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	116.166.000	116.015.000	99,87
1	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.275.000	15.275.000	100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	53.478.000	53.423.000	99,90
3	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	47.413.000	47.317.000	99,80
VII	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	267.419.000	263.818.000	98,65
1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	155.485.000	155.485.000	100,00
2	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	48.446.000	48.446.000	100,00
3	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.488.000	59.887.000	94,33
VIII	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	65.210.000	64.720.500	99,25
1	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	65.210.000	64.720.500	99,25
IX	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	76.380.000	59.530.000	77,94
1	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	76.380.000	59.530.000	77,94
X	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	430.998.500	430.563.300	99,90
1	Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana	197.140.500	197.140.500	100,00
2	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	153.370.000	152.939.000	99,72
3	Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	80.488.000	80.483.800	99,99
XI	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	630.932.500	420.028.600	66,57
1	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	125.846.000	76.499.000	60,79
2	Simulasi Pengendalian Kebakaran	22.579.000	20.963.000	92,84



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

3	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	225.465.000	217.525.000	96,48
4	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	257.042.500	105.041.600	40,87
XII	Pengendalian Kebakaran Hutan	1.425.660.400	296.785.777	20,82
1	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla	772.090.000	-	0,00
2	Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	163.657.000	143.020.377	87,39
3	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	118.979.400	74.587.400	62,69
4	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	53.264.000	-	0,00
5	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi Terkait Lainnya	79.508.000	36.728.000	46,19
6	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	187.562.000	-	0,00
7	Pos Komando (Posko) Siaga	50.600.000	42.450.000	83,89
	TOTAL	8.505.635.071	7.074.199.361	83,17





LAMPIRAN 4 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2018

NO	FORUM	MATERI	JML KOORDINASI	INSTANSI VERTIKAL	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	HASIL & MANFAAT
					NAMA SKPD	JML PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Forum Kerukunan Umat Beragama	Forum Kerukunan Umat Beragama	1	Kementerian Agama dan Polres	POL. PP	1	S2	IV/a	-	-	
2	Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebakaran Hutan dan Lahan	4	TNI, Polri dan TNBK	Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu	32	S1 dan SMA	Penata / III/a dan Pengatur/Iic	APBD	141.000.000	
	Jumlah									141.000.000	



LAMPIRAN 5 PEMBINAAN BATAS-BATAS WILAYAH TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMBINAAN BATAS-BATAS WILAYAH TAHUN 2017

NO	SENGKETA BATAS WILAYAH	WILAYAH			SKPD YG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	HASIL
		DESA	KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA SKPD	JML PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Pemda	Pala Pulau	-	Putussibau Utara	Satpo 1 PP	30	S1 dan SMA	III/d dan Gol. II	-	-	Sengketa Belum Selesai
					Pengadilan	10	S2 dan S1	-			
					Polisi	6	S1 dan SMA	-			
										-	



LAMPIRAN 6 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2018

NO	JENIS BENCANA	PENANGGULANGAN NYA	STARUS BENCANA	POTENSI BENCANA	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER & JML ANGGARAN	KELEMBAGAAN YG DIBENTUKAN	ANTISIPASI
					NAMA SKPD	JML PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kebakaran Hutan dan Lahan	Pemadaman	Siaga		Satpol PP		SMA dan S1	Gol. II dan Gol. III		Satgas Karhutla	
2	Kebakaran Pemukiman	Pemadaman			Satpol PP		SMA dan S1	Gol. II dan Gol. III			
3	Banjir	Evakuasi Korban banjir dan harta benda			Satpol PP		SMA dan S1	Gol. II dan Gol. III			
4	Tanah Longsor				Satpol PP		SMA dan S1	Gol. II dan Gol. III			



LAMPIRAN 7 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2018

NO	JENIS GANGGUAN	CARA PENANGANAN	KESULITAN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI	SKPD YANG MELAKSANAKAN				SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	HASILNYA
					NAMA SKPD	JLM PEGAWAI	LATAR BLK PENDIDIKAN	PANGKAT & GOLONGAN			
1	Pendataan KTP	Razia Identitas	Kurang Sosialisasi dari Instansi terkait	POLRI, POM, IMIGRASI dan DUKCAPIL	SATPOL.PP	45 Orang	S2, S1, dan SMA	IV/b, III/d, II/d, II/c, II/b, II/a	DPA		Laporan
2	Trantibum	Razia Penginapan		POLRI DAN POM	SATPOL.PP	45 Orang	S2, S1, dan SMA	IV/b, III/d, II/d, II/c, II/b, II/a	DPA		Laporan
3	Penertiban Izin dan KTP tempat hiburan malam	Razia Identitas Viar Cafe dan Izin Cafe	Belum pahamnya Pemilik akan Pajak Daerah	POLRI DAN POM	SATPOL.PP	45 Orang	S2, S1, dan SMA	IV/b, III/d, II/d, II/c, II/b, II/a	DPA		Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2018

LAMPIRAN 8 DATA PEGAWAI SATPOL PP TAHUN 2018

DATA PEGAWAI PER DESEMBER 2018
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.URUT	BAGIAN/ BIDANG/ URUSAN	PANGKAT DAN GOL. II						PANGKAT DAN GOL. III						PANGKAT DAN GOL. IV															
		JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	DIKLAT PIM		JLH	JENIS KELAMIN		JLH	PENDIDIKAN		JLH	DIKLAT PIM		JLH				
		L	P		SMP	SMA		L	P		SMA	DIPLOMA		S1	S2		III	IV		L	P		DIPLOMA	S1		S2	II	III	IV
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11(9+10)	12	13	14	15	16(12 S.D.15)	17	18	19(17+18)	20	21	22(20+21)	23	24	25	26(23 s.d.25)	27	28	29	30(27 s.d.29)
1	SEKRETARIAT			0			0			0					0			0	1		1			1	1			1	1
	A. ESELON II			0			0			0					0			0	1		1			1	1			1	1
	B. ESELON III			0			0			0					0			0	1		1			1	1			1	1
	C. ESELON IV			0			0	1	2	3	1		2	3	3	3	3	0			0			0	0			0	0
	D. PELAKSANA	4		4		4	4	1	4	5	2		2	1	5	1	1			0				0				0	0
	JUMLAH	4	0	4	0	4	4	2	6	8	3	0	2	3	8	1	3	4	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	2
2	Bidang Penegakan dan Operasi																												
	A. ESELON II			0			0			0					0			0			0				0				0
	B. ESELON III			0			0			0					0		1			1			1	1				1	1
	C. ESELON IV			0			0	2		2	1		1		2		2	2			0			0				0	0



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2018

	D. PELAKSANA	4		4	1	3	4			0				0			0			0			0				0		
	JUMLAH	4	0	4	1	3	4	2	0	2	1	0	1	0	2	0	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.	Bidang Linmas & Penanggulangan Bencana																												
	A. ESELON II			0			0			0				0			0						0				0		
	B. ESELON III			0			0			0				0			0						0				0		
	C. ESELON IV			0			0	2		2	1		1		2	2						0				0			
	D. PELAKSANA	2	1	3	1	2	3	6		6	5		1		6							0				0			
	JUMLAH	2	1	3	1	2	3	8	0	8	6	0	2	0	8	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil																												
	A. ESELON II			0			0			0				0			0									0			
	B. ESELON III			0			0			0				0		0	1		1		1					1			
	C. ESELON IV			0			0	2		2	2			2	2		2					0				0			
	D. PELAKSANA	9		9		9	9	1		1	1			1			0								0				
	JUMLAH	9	0	9	0	9	9	3	0	3	3	0	0	0	3	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
5.	Jabatan Fungsional	23	1	24			0	1	0	1	24		1		25										0				
	TOTAL	42	2	44	2	18	20	16	6	22	37	0	6	3	46	3	7	10	4	0	4	0	1	3	4	0	0	4	





LAMPIRAN 9 ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN WAJIB TAHUN 2018
(PELAYANAN DASAR DAN BUKAN PELAYANAN DASAR)

No	Urusan	Anggaran						Realisasi					
		Belanja Tidak Langsung	Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jlh Belanja Langsung	Total Anggaran Urusan	Belanja Tidak Langsung	Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah Belanja Langsung	Total Realisasi Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.772.858.000	2.866.190.000	4.700.745.071	938.700.000	8.505.635.071	14.278.493.071	5.751.006.162	2.761.260.000	4.144.228.411	168.710.950	7.074.199.361	12.825.205.523



LAMPIRAN 10 HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS URUSAN

HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS URUSAN

Dinas/ Badan/ Kantor: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Urusan yang dilaksanakan: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hambatan Pelaksanaan Urusan	<p>A. FAKTOR INTERNAL</p> <p>1. Personil Satpol PP</p> <p>Ketersediaan jumlah personil tidak sebanding dengan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga pelaksanaan tugas masing-masing unit/regu/peleton yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP sepanjang tahun 2018 terjadi penumpukan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing individu personil Sat Pol PP. Standar efektifitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki regu patroli kota minimal 15 orang- Memiliki regu patroli air minimal 6 orang- Memiliki regu penjagaan pada rumah dinas pejabat daerah minimal 4 orang dalam satu regu dan 6 orang dalam satu regu piket di Kantor Bupati Kapuas Hulu- Memiliki regu deteksi dini/intelijen minimal 10 orang- Memiliki peleton Dalmas/Anti huru hara berjumlah 30 orang- Memiliki regu taktis/penindakan penanganan pelanggaran tibum dalam kota minimal 30 orang- Memiliki unit PPNS minimal 3 orang <p>Sehingga kebutuhan personil operasional lapangan/non administrasi idealnyanya berjumlah 118 orang</p> <p>2. Personil Satlinmas</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan personil Satlinmas pada desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu- Peran serta Satlinmas di tiap-tiap desa belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan <p>3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :</p> <p>a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya personil yang memiliki Pangkat/gol.ruang III/a yang menjadi syarat mengikuti diklat PPNS- Terbatasnya personil golongan III yang memiliki Ijazah S-1 Ilmu Pemerintahan dan S-1 Ilmu Hukum yang merupakan ilmu linear
-----------------------------	---



	<p>dalam kualifikasi diklat PPNS Pol PP</p> <p>b. Tenaga profesional Personil Pemadam Kebakaran Minimnya personil pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi khusus dalam perencanaan dan penanganan kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan/hutan</p>
	<p>c. Analisis Hukum dan peraturan perundang-undangan Tidak adanya analisis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu</p> <p>4. Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak adanya kendaraan taktis dalam mobilisasi personil (truck dalam pengangkut pasukan)- Terbatasnya alat pelindung diri dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 15 unit dan idealnya 30 unit.- Tidak adanya kamera pengawas (CCTV) di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah pada titik-titik rawan yang tidak terpantau oleh petugas piket- Tidak adanya kendaraan operasional patroli roda dua untuk memantau daerah-daerah rawan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat- Tidak adanya kendaraan operasional patroli air sehingga kejadian pelanggaran tumbang di daerah perairan terhambat- Tidak adanya alat komunikasi (HT) dengan jangkauan meliputi 23 kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi taktis lapangan antar sektor dalam kabupaten Kapuas Hulu- Minimnya tempat penampungan air (Tandon/Reservoir) untuk cadangan air pemadam kebakaran yang saat ini hanya berjumlah 4 penampungan air yaitu 2 tandon di Putussibau kota dan 1 tandon, 1 reservoir di Kedamin. Sehingga diperlukan minimal 4 tandon lagi di Putussibau kota dan 4 tandon di Kedamin <p>5. Anggaran Operasional Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah kabupaten Kapuas Hulu</p> <p>6. Wilayah Manajemen Kebakaran Sampai tahun 2018 baru terbentuk 1 WMK yaitu di Putussibau Kota sehingga idealnya untuk wilayah Putussibau kota dan Kedamin harus terbentuk 2 WMK</p> <p>7. UPT Polisi Pamong Praja Belum terbentuknya UPT di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Sat Pol PP Kabupaten dengan Sat Pol PP kecamatan</p>



	<p>B. FAKTOR EKSTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fungsi Koordinasi Antar OPD Tidak berjalan dengan maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang menjalankan Perda/Perkada sehingga pengawasan/penindakan pelanggaran Perda/Perkada oleh Sat Pol PP menjadi lambat. Ego sektoral menjadi penghambat berjalannya fungsi koordinasi secara maksimal dan optimal2. Produk Hukum Perda dan Perkada Perda yang mengatur tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda tersebut sudah tidak berlaku lagi
Solusi yang telah dilaksanakan	<p>A. FAKTOR INTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personil Pol PP Upaya yang dilakukan Sat Pol PP Kab. Kapuas Hulu dalam menanggulangi kekurangan personil operasional adalah melibatkan seluruh unsur personil, baik unsur personil lapangan maupun unsur personil administrasi dalam pelaksanaan tugas patroli, penjagaan, pengendalian massa (Dalmas), intelijen, regu taktis sehingga 1 (satu) orang personil Pol PP melaksanakan tugas lebih dari satu tanggung jawab pekerjaan. Tumpang tindih pembebanan tanggung jawab pekerjaan membuat pelaksanaan fungsi pembinaan dan penindakan penyelenggaraan trantibmas menjadi tidak efektif dan maksimal. Langkah-langkah yang diambil diantaranya
	<ol style="list-style-type: none">a. Menugaskan personil untuk melakukan piket pada pos penjagaan rumah dinas pejabat dan kantor Bupati Kapuas Hulu selama 1x24 jamb. Mengatur jadwal patroli, operasi intelijen, pengendalian massa dan operasi regu taktis sehingga seluruh sasaran kegiatan dapat dilaksanakan meskipun hasilnya kurang efektif dan maksimal dikarenakan kemampuan fisik anggota terbatas untuk melakukan seluruh kegiatan yang ada <ol style="list-style-type: none">2. Personil Satlinmas<ol style="list-style-type: none">a. Mengingat biaya pengadaan pakaian dan perlengkapan personil Satlinmas se-Kabupaten Kapuas Hulu relatif besar, maka Sat Pol PP Kapuas Hulu hanya melengkapi personil Satlinmas desa-desa yang termasuk dalam program Kampung KBb. Melakukan penyuluhan ke desa-desa yang tergolong rawan gangguan trantibmas khususnya desa-desa yang berbatasan dengan malaysia dan desa-desa yang rawan bencana alam3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur



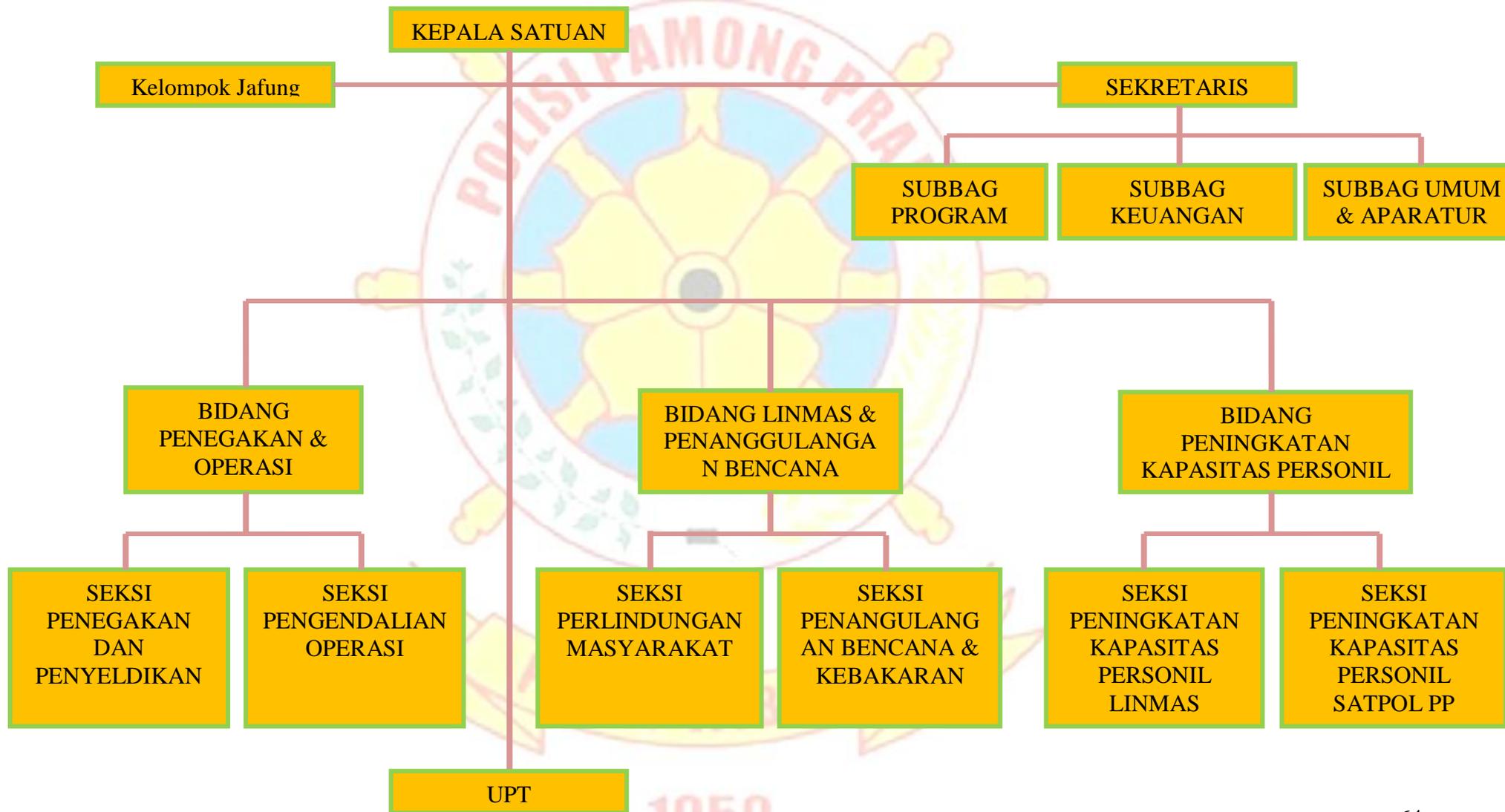
	<ul style="list-style-type: none">a. PPNS Sampai periode bulan Desember 2018 Sat Pol PP hanya memiliki 1 (satu) orang PPNS dan belum mengirimkan personil untuk mengikuti diklat sertifikasi PPNS mengingat keterbatasan sumber daya personil yang memenuhi persyaratan kualifikasi PPNSb. Tenaga Profesional Personil Pemadam Kebakaran Sampai periode bulan Desember 2018 personil pemadam kebakaran yang telah mengikuti bimtek pemadam kebakaran berjumlah 3 (tiga) orang hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran pendidikan dan latihan pada tahun anggaran 2018 serta tidak adanya panggilan bimtek pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi maupun pusatc. Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Melakukan optimalisasi jabatan fungsional Pol PP untuk melakukan analisa segala bentuk pelanggaran perda/perkada meskipun kualifikasi ilmu tidak linear dengan kebutuhan tugas yang disyaratkan serta bekerjasama dengan pihak Polres Kapuas Hulu <p>4. Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memaksimalkan kendaraan dinas yang dimiliki serta kendaraan pribadi dalam melakukan mobilisasi personil meskipun daya tampung kendaraan tidak mencukupi jumlah personil yang akan dimobilisasi
	<ul style="list-style-type: none">b. Mengintensifkan strategi negoisasi dalam penanganan unjuk rasa sehingga dapat meminimalisir segala bentuk tindakan-tindakan anarkis serta bekerjasama dengan personil Dalmas Polres Kapuas Huluc. Mengintensifkan pengawasan dalam bentuk patroli lingkungan di wilayah rumah dinas pejabat dan kantor Bupati Kapuas Hulud. Melakukan pendekatan yang intensif kepada para ketua RT/RW di tiap-tiap kelurahan untuk bekerjasama melaporkan atau melakukan pengawasan terhadap segala bentuk potensi gangguan tibus serta melaporkan ke Sat Pol PP
	<ul style="list-style-type: none">e. Untuk patroli air tidak dapat dilaksanakan mengingat kebutuhan operasional BBM yang cukup besar dan tidak adanya kendaraan patroli air sehingga segala bentuk potensi gangguan tibus yang terjadi hanya dilakukan pengumpulan informasi dari sumber terpercaya dan bekerjasama dengan Polairud Polres Kapuas Hulu dalam penindakannyaf. Sarana komunikasi hanya memanfaatkan HP antar personil dilapangan meskipun dinilai kurang efektif mengingat seringnya terjadi gangguan jaringan selulerg. Untuk daerah yang tidak memiliki cadangan air atau tidak terpasang tandon dan reservoir maka Satdamkar menggunakan air kapuas atau



	<p>dari PDAM sehingga pemadaman api terhambat khususnya daerah-daerah kebakaran yang jarak tempuh lebih dari 15 menit</p> <ol style="list-style-type: none">5. Anggaran Operasional<ol style="list-style-type: none">a. Intensifitas pengawasan daerah-daerah rawan terdekat dan bekerjasama dengan Banbinsa dan Babinkamtibmas untuk menanggulangi keterbatasan anggaran dalam melakukan deteksi dini gangguan tibus di kabupaten Kapuas Hulub. Mengurangi jumlah personil yang ditugaskan dalam melakukan deteksi dini maupun penindakan pelanggaran6. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)<ol style="list-style-type: none">a. Mengintensifkan Response Time Rate meskipun sumber kebakaran jauh dari Posko Damkarb. Bekerjasama dengan yayasan Pemadam Kebakaran, Satgas Damkar Bandara Pangsuma untuk kejadian kebakaran di daerah Keadamin7. UPT Polisi Pamong Praja<ol style="list-style-type: none">a. Meskipun peran serta personil Sat Pol PP di Kecamatan dinilai belum maksimal tetapi jalur komando tetap dilaksanakan dengan melakukan kerjasama tim intelijen Sat Pol PP Kabupaten dengan tim intelijen Polsek dan Koramil dalam pengawasan serta penindakan gangguan tibus di wilayah kecamatan dalam kabupaten Kapuas Hulub. Mendorong para Kepala Seksi Trantibus di Kecamatan untuk menyampaikan situasi dan kondisi trantibus di wilayah kecamatan secara periodik <p>B. FAKTOR EKSTERNAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fungsi Koordinasi antar OPD<ol style="list-style-type: none">a. Mendatangi langsung OPD yang bersinergi dengan tugas dan fungsi penegakan perda/perkada
	<ol style="list-style-type: none"><ol style="list-style-type: none">b. Melakukan inventarisasi perda/perkada yang sudah ditetapkan dan mengkonsolidasikannya dengan OPD penanggung jawab pelaksanaan perda/perkada tersebut2. Produk Hukum Perda dan Perkada Meningat keterbatasan anggaran maka revisi perda trantibus baru dianggarkan pada tahun 2019 dan analisa terhadap produk perda/perkada terus dilakukan untuk mengetahui pelaksanaannya apakah sudah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

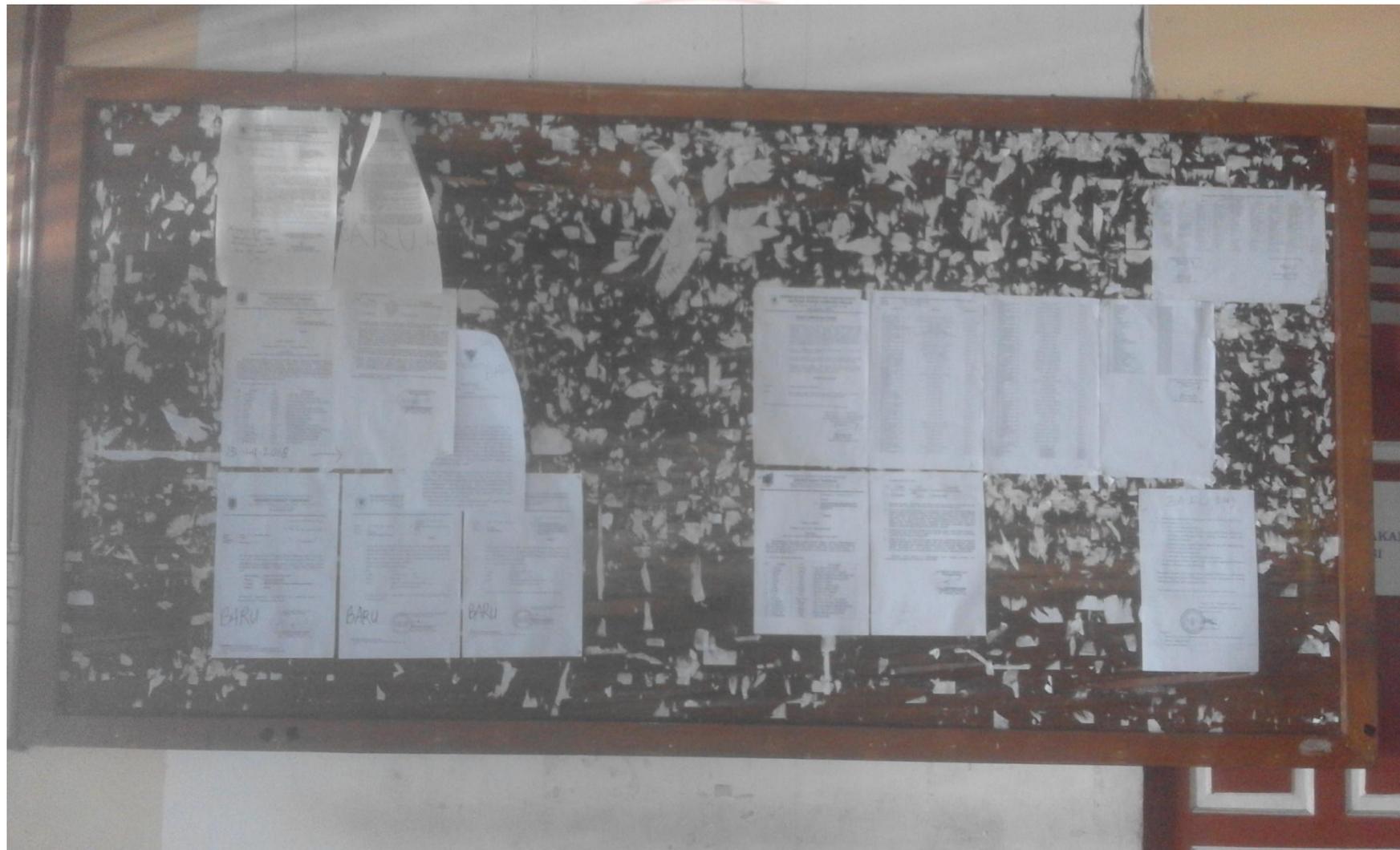


LAMPIRAN 11 STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP TAHUN 2018





LAMPIRAN 12 PAPAN PENGUMUMAN



1950



Pos Rumah Dinas Bupati



Pos Rumah Dinas Wakil Bupati



Pos Rumah Dinas Sekda



Pos Kantor Bupati



LAMPIRAN 14 FOTO KEGIATAN SATPOL PP TAHUN 2018
Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum



19511



Pengawasan Pedagang Kaki Lima



Razia KTP



Penertiban APK



1950



Rapat Penilaian Kredit Point Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja



Kesamaptaan Polisi Pamong Praja/ Bela Diri





**Pemadaman Kebakaran Hutan dan
Simulasi Pengendalian Kebakaran**





1950



LAMPIRAN 15 FOTOCOPY RENSTRA 2016-2021, RENJA 2018, RKA 2018 DAN DPPA 2018

LAMPIRAN 16 LAPORAN KEUANGAN (Neraca, LRA dan CaLK)

LAMPIRAN 17 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAMPIRAN 18 BERITA ACARA REKON ASSET

LAMPIRAN 19 PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU

LAMPIRAN 20 DAFTAR URUT KEPANGKATAN & NOMINATIF

LAMPIRAN 21 KARTU INVENTARIS BARANG

LAMPIRAN 22 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK-0)

